# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



# IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN "SMP ISLAM DAARUL MUNTAHA"

Nomor: 503/ 06 - SMP/DPMPTSP/2019

# **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM Nataatmaja Nomor 5 Telp./Fax. (0252) 202772 Rangkasbitung - 42312

#### PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

Nomor

: 503/ 06 -SMP/DPMPTSP/2019

Lampiran

:-

#### TENTANG:

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK,

Membaca

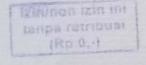
: Surat permohonan dari Kepala Sekolah SMP Islam Daarul Muntaha Nomor: 001/S.IOP/SMPDARMUN/A.1/D/VII/ 2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Islam Daarul Muntaha;

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Daarul Muntaha sebagai lembaga pendidikan telah di dirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Swasta, sehingga perlu diatur dan dibina agar penyelenggaraannya lebih baik untuk tercapainya kualitas pendidikan masyarakat;
  - b. bahwa setiap menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki izin operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
   Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
   Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);



- Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2Q18 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 57);

#### Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Nomor: 421.3/1181-SMP/2019 tanggal 27 September 2019 Perihal Rekomendasi.

#### MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :

Nama badan hukum : Yayasan Pondok Pesantren Daarul

Muntaha

Nama sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Islam Daarul Muntaha

Nomor Induk Berusaha: 9120002941466

(NIB)

NPWP : 84.738.321.3-419.000

Alamat : Kp. Kaso Aboh RT/RW.007/001

Kel/Desa Sukaraja Kecamatan

Warunggunung, Kabupaten Lebak

No. Telp/HP : 087774198871

No. Fax/E-mail : ponpesdaarulm@gmail.com Titik koordinat lokasi : Bujur 106° 17' 73,2' BT

Lintang 06° 31' 72,2° LS

**KEDUA** 

: Penanggung jawab atau kepala sekolah menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

KETIGA

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;



Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru;

KELIMA

Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal:

0 2 OCT 2019

a.n. BUPATI LEBAK Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut.,MT.,M.Sc NIP. 19751221 200003 1 002

#### Tembusan:

1. Yth. Bupati Lebak.

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

4. Yth. Kepala UPT DISDIKBUD Kecamatan Warunggunung.

